**PROSES PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B
TERHADAP PENYELUNDUPAN BAWANG DI KOTA DUMAI TAHUN
2015-2019**

Oleh : Santri Juniarti

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Directorate General of Customs (DJBC) is a gate for export and import activity. As the entry and exit gates of commodities, it made Customs Agency known as Trade Facilitator. Import activities are very close with smuggling. Smuggling cause the state has material and non-material losses. The smuggling becomes the main concern of Dumai Custom Service and Supervision Office to oversee the commodities that in and out of this country besides their duty, customs service. The purpose of the research is to know the supervision process by Supervisory Custom Service Office (KPPBC) Middle Type Customs B toward onion smuggling in Dumai year 2015 – 2019 and also to know the obstacles in carry out the duty. This is a qualitative research. The techniques have been used in conducted the research is (1) interview and (2) documentation. The conclusion of this research indicates that the supervision duty by Supervisory Custom Service Office (KPPBC) Middle Type Customs B toward illegal onion has not been done maximally because the supervision has not been done effectively, measurement and the standard of supervision still poor, work evaluation at Customs Office is still not maximal, deviation improvement is not working. Factors that obstruct the implementation of Customs Service office Middle Type Customs B is the insufficient number of executive officers, inadequate patrol boats, and the numbers of People port's as the entry point of illegal onion.

Keywords: standard, working evaluation, deviation improvement

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan bertambahnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebas-bebasnya untuk pemasukan barang dari negara lain, bahkan di negara-negara yang menganut sistem pasar bebas sekalipun.

Perdagangan internasional melalui pasar bebas dari berbagai jenis barang berguna memenuhi kebutuhan manusia setiap harinya, tidak jarang bagi pengusaha dalam dunia usaha yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor sering ditemukan penyimpangan, khususnya bagi pelaku usaha importir maupun eksportir yang mengharapkan keuntungan yang besar tidak jarang melakukan atau melanggar peraturan dengan berbagai cara atau modus misalnya : memalsukan dokumen, memalsukan isi dari kontainer dan berbagai bentuk yang lainnya. Tentunya hal ini tentu akan sangat merugikan negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang keluar masuk jalur untuk kegiatan ekspor dan impor. Sebagai sebuah

gerbang masuk dan keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*. Lembaga Bea dan Cukai harus memberikan pelayanan yang mencirikan kata *save time, save cost, safety and simple*. Dengan menggunakan ciri-ciri tersebut, diharapkan lembaga Bea dan Cukai ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, masyarakat, pedagang dan pelaku industri.¹

Impor barang sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan sendiri memiliki arti yaitu perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lain.²

Kasus penyelundupan kian hari kian bertambah dan ada berbagai jenis barang yang diselundupkan. Jika tidak segera diatasi maka kerugian yang dialami negara juga tentunya akan semakin meningkat. Apalagi dengan beberapa jenis barang yang diselundupkan tidak sedikit nilainya, sehingga kasus ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa adanya solusi yang jelas serta sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Untuk menghindari hal tersebut, keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus

---

¹Triyani dan Murti Ayu Hapsari, 2015, GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015

²Syahputra, Azmi, 2015, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan, volume 3 No. 1

dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan. Adapun kegunaan dari kerjasama tersebut adalah untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara. Berikut merupakan tabel daftar kasus komoditi yang diselundupkan di tahun 2015-2019 :

Tabel 1
Daftar Komoditi yang
Diselundupkan Tahun 2015-2019 :

No.	Jenis Komoditi	Jumlah Kasus
1.	Bawang Merah	39
2.	Hasil Tembakau	30
3.	Tekstil & Produk Tekstil (Termasuk Serat & Benang)	24
4.	Barang Lainnya	23
5.	Minuman Mengandung Etil Alkohol	17
6.	Kosmetik, Obat-obatan dan Bahan Kimia	9
7.	Handphone, Gadget, Part & Accesories	8
8.	Alas Kaki dan Tas	7
9.	NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6
10.	Ballpres (termasuk pakaian bekas)	6
11.	Makanan dan Minuman	5

12.	Sembako Lainnya	4
13.	Elektronik	3
14.	Logam Mulia dan Perhiasan	3
15.	Senjata Api, Air Soft Gun, Bahan Peledak & Ammonium Nitrat	2
16.	Gula	2
17.	Mesin, Alat Berat, Part & Accesories	2
18.	Crude Oil, Pelumas & BBM	1
19.	Perkakas (Mekanik/Elektrik)	1
20.	Biji & Produk Plastik (Kec. Furniture)	1
	Jumlah	193

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai, 2019

Dumai merupakan Kota pelabuhan di pesisir pantai Riau yang menjadi jalur masuknya barang-barang ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai disini bertugas dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yaitu mengawasi lalu lintas barang baik ekspor maupun impor. Barang yang masuk dan keluar dicek dan harus sesuai dengan manifest.

Manifest merupakan dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut (kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan.

Seperti yang sudah tertera pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 Tanggal 30

Oktober 2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi :

1. Sebelum kedatangan sarana pengangkut di suatu Kantor Pabean, pengangkut wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyerahkan pemberitahuan yang sedikit-dikitnya mencantumkan :
  - a. nama sarana pengangkut;
  - b. nomor pengangkutan (misalnya : Voyage/Flight No. : .....);
  - c. nama pengangkut;
  - d. pelabuhan asal;
  - e. pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;
  - f. pelabuhan tujuan;
  - g. perkiraan tanggal kedatangan kapal;
  - h. rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar;
  - i. pelabuhan tujuan berikutnya di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara manual atau melalui media elektronik paling lama dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam

sebelum kedatangan sarana pengangkut.

3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pabean merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.
4. Setiap perubahan rencana kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tidak berlaku bagi Sarana Pengangkut yang dapat dari luar daerah pabean melalui darat.

Setiap tahunnya jumlah volume bawang yang diselundupkan jumlahnya berbeda-beda. Berikut merupakan hasil perhitungan volume bawang selundupan dalam satuan kilogram dan ton pada tahun 2015-2019 :

Tabel 2

Volume bawang yang diselundupkan Tahun 2015-2019 :

No.	Tahun	Berat (ton)
1.	2015	106,577
2.	2016	312,860
3.	2017	23,754
4.	2018	0
5.	2019	15,7

Jumlah	458,891

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai, 2019

Dengan kerugian Seperti yang tercatat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai sepanjang Tahun 2015-2019. Berikut data kerugian negara pada komoditi bawang :

Tabel 3

Data Kerugian Negara Pada Komoditi Bawang

No.	Tahun	Total Kerugian (Rp)
1.	2015	45.000.000
2.	2016	1.909.613.104
3.	2017	175.583.725
4.	2018	0
5.	2019	94.200.000
Jumlah		2.224.396.829

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai, 2019

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Proses Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Terhadap Penyelundupan Bawang di Kota Dumai Tahun 2015-2019.**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B terhadap penyelundupan bawang di Kota Dumai Tahun 2015-2019?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B dalam proses pengawasan terhadap penyelundupan bawang di Kota Dumai Tahun 2015-2019?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B terhadap penyelundupan bawang Di Kota Dumai Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B dalam proses pengawasan terhadap penyelundupan bawang di Kota Dumai Tahun 2015-2019.

KERANGKA TEORI

Pengawasan

Tindakan pengawasan atau *controlling* adalah mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan maksudnya

mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana pengawasan atau *controlling*, merupakan aktifitas untuk menentukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting terhadap aktifitas-aktifitas yang direncanakan.

Merupakan hal yang wajar apabila dalam suatu pelaksanaan terdapat kekeliruan-kekeliruan, kegagalan-kegagalan dan adanya petunjuk-petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan daripada tujuan yang ingin dicapai.³

Pengawasan itu mencakup :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Untuk memperbaiki kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana telah terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana atau tidak.⁴

³ Winardi, Azas-azas Manajemen, Bandung : Alumni Bandung, 1979, hlm : 22

⁴ Sujati, Sri, Perilaku Organisasi, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hlm : 136

Pengawasan yang dimaksud adalah usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, akan dapat lebih diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.⁵

Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup bijaksana apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu.⁶

Pengawasan efektif dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Adanya ukuran dan standar
2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan.
3. Pembetulan penyimpangan.⁷

⁵ Nitisemito, Alex, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989, hlm : 105

⁶ Ibid, 139

⁷ Manullang, M, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, hlm : 102

Penyelundupan

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.⁸

Seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum, tertulis didalam Undang-Undang.
3. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain.
4. Adanya *schuld* (kesalahan, dosa).
5. Adanya ancaman hukuman pidana⁹.

Menurut Adam Smith penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah

dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat tindakan tersebut.¹⁰

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *Smuggle* diartikan sebagai berikut : *To import or eksport secretly contrary to the law and and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).¹¹

Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.¹²

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang dihasilkan dari metode pendekatan deskriptif berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain-lain.

---

¹⁰Sukinto, Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm : 39

¹¹ Marpaung, Leden, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm : 3

¹² Hamzah, Andi, Delik Penyelundupan, Jakarta : Akademi Pressindo, 1985, hlm : 11

---

⁸Lopa, Baharuddin, Tindak Pidana Ekonomi, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990, hlm : 29

⁹ Ibid, 39

Tujuan dari metode penelitian ini adalah menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, menemukan teori, dan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, dapat ditarik suatu pernyataan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya. Disini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian untuk mengeksplor fenomena proses pengawasan atas masuknya barang ilegal sebagai salah satu fungsi pengawasan dan pencegahan sebagai bagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Madya Terhadap Penyelundupan Bawang Di Kota Dumai Tahun 2015-2019

Kantor Pelayanan Utama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas-tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang dimaksud dijabarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 /PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 113, berikut penjabarannya :

- a. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan , dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai .
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai .
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai.
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja : pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

A. Menentukan Standar

Pengawasan terdiri dari beberapa macam tahapan pertama, tahap penetapan standar, kedua tahap penentuan pengukuran pelaksanaan

kegiatan, ketiga tahap pembandingan pelaksanaan penyimpangan dan tahap pengambilan koreksi. Tujuannya untuk mengetahui fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Madya terhadap penyelundupan bawang di Kota Dumai, dapat diketahui pada pembahasan berikut :

Penetapan tugas dan fungsi pada pelaksanaan pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B Madya Dumai berperan penting dalam menjalankan tugas pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Hal tersebut guna untuk melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang yang tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 /PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Kepala Kantor, Subbagian Umum dan Pelaksana Pemeriksa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam menjalankan tugas pengawasan dilimpahkan kepada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2), pada bagian tersebut dibagi kembali menjadi beberapa bagian atau subseksi.

Sebagaimana dijelaskan oleh oleh Bapak Sapar A. Hasibuan selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan menambahkan :

“Tugas pengawasan dilimpahkan kepada Seksi Penindakan dan

Penyidikan (P2). Pada bagian tersebut dibagi lagi menjadi 3 subseksi dan menjalankan pula tugas masing-masing, yaitu : pertama, subseksi Penindakan dan Sarana Operasi secara garis besar mempunyai tugas melaksanakan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; kedua, Subseksi Intelijen secara garis besar mempunyai tugas sebagai pengumpul, pengalisis, penyaji, dan penyebar informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; ketiga, Subseksi Penindakan mempunyai tugas melakukan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengendalian tindak lanjut hasil penindakan.”

(Sumber : Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, 22 November 2018)

Kota Dumai merupakan kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, hal ini tentunya sangat rentan dengan tindak penyelundupan. Tindak penyelundupan sendiri terjadi dikarenakan oleh beberapa aspek salah satunya yaitu barang yang masuk dan keluar tidak sesuai dengan manifest.

Manifest merupakan dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut (kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nana Arisman selaku

Pelaksana Pemeriksa terkait barang yang tidak disertai manifest, beliau mengatakan :

“Barang impor apapun jenisnya yang dimasukkan tidak melalui jalur yang resmi atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dianggap sebagai barang selundupan. Misal : barang yang masuk tanpa disertai manifest atau membongkar muatan diluar kawasan pabean itu dianggap melanggar peraturan dan harus ditindak lanjuti.”

(Sumber : Pelaksana Pemeriksa, 3 Desember 2018)

Dalam menetapkan standar tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Kota Dumai secara garis besar mengacu pada surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 Tanggal 30 Oktober 2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor pada BAB II Pasal 2. Pada surat keputusan tersebut dijelaskan secara rinci tata cara proses pemasukan barang impor ke dalam negeri.

B. Penilaian Pekerjaan

Mengingat fungsi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Madya Kota Dumai, tentu tidak luput dari menjalankan tugas pengawasan. Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang didaerah pabean. Gunanya untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan

kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Bawang merah ilegal sendiri sangat dikhawatirkan keberadaannya, untuk itu pihak Bea Cukai menanggapi hal ini dengan serius. Melalui pembagian tugas beerdaasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Tugas pengawasan dilimpahkan kepada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2). Pada bagian tersebut terdapat 3 Subseksi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sepertinya yang akan dikatakan oleh Bapak Samsul Bahri selaku Kasubseksi Intelijen sebagai berikut :

“Sistematika dari tugas pengawasan sendiri dimulai dari subseksi intelijen, yang bertugas mengumpulkan informasi dan data yang selanjutnya disampaikan ke subseksi penindakan, yang bertugas melakukan tugas pengejaran dan pengeksekusian selanjutnya diteruskan ke subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan, yang tugasnya melihat dugaan aturan pelanggaran baik pidana ataupun administrasi.”(Sumber : Kasubseksi Intelijen, 3 Desember 2018)

Penilaian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi

pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator-indikator rencana tingkat pencapaian kinerja.

Pembetulan Penyimpangan

Setiap pekerjaan yang dilakukan sedikit banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, hal itu tentunya perlu tindakan atau upaya pembetulan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Madya Kota Dumai juga perlu mengadakan tindakan evaluasi pada aparatnya, dengan melakukan tindakan :

1. berkerja secara ekstra.
2. meningkatkan standar pekerjaan terutama di bidang pengawasan.
3. mencari tahu sebab penyimpangan.

Jika hal ini dapat direalisasikan dengan baik, maka pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan lebih baik dan hasil yang didapat lebih optimal.

Faktor-faktor Penghambat Dalam Proses Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Madya Terhadap Penyelundupan Bawang Di Kota Dumai Tahun 2015-2019

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Jumlah Pegawai

Salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas

pengawasan oleh KPPBC Tipe B Madya Kota Dumai adalah kurangnya jumlah pegawai. Berikut data penjabaran jumlah pegawai di KPPBC Tipe B Madya Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 4

Data Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMPB Berdasarkan Penyebaran Unit Kerja

No	Unit Kerja	Eselon			Pe me rik sa	Ad mi nis tra si	To tal
		III	IV	V			
1.	Kepala Kantor	1	-	-	-	-	1
2.	Sub Bagian Umum	-	1	3	17	1	22
3.	Seksi Penindakan dan Penyidikan	-	1	3	17	4	25
4.	Seksi Perben daharan	-	1	3	3	-	7
5.	Seksi Pelayanan Kepabe anan dan Cukai	-	6	10	18	12	46
6.	Seksi Penyul uhan dan Layana n Inform asi	-	1	1	1	1	4
7.	Seksi Kepatu han Interna l	-	1	2	1	1	5
8.	Seksi Pengoa han Data dan Admini	-	1	-	3	-	4

	strasi					
Jumlah	1	12	22	60	19	114

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Madya Kota Dumai, 2019

Bagian yang bertugas dalam melaksanakan tugas intelijen, patroli, operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran adalah bagian P2 (penindakan dan penyidikan). Pada tabel diatas terdapat 25 jumlah pegawai dibagian P2 (penindakan dan penyidikan), jumlah tersebut tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan.

2. Kapal Patroli yang Kurang Memadai

Berdasarkan data statistik penindakan per jenis komoditi melalui jalur laut, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga pengawasan bea cukai melalui patroli laut harus berbanding lurus dengan sarana prasarana yang memadai. Namun kenyataannya tidak seperti itu, yang dimana wilayah pengawasan terdapat cuaca yang esktrim terutama di selat Malaka sehingga kurang ideal untuk patroli laut dengan menggunakan kapal kecil.

Tabel 5

Kapal Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Dumai

No.	No. Kapal	Jenis Kapal	Jenis Mesin
1.	BC 10001	Speed Boat 10 Meter	Mesin 2 x 250 PK, Yamaha

2.	BC 15016	Speed Boat 15 Meter	Mesin 3 x 250 PK, Yamaha
3.	BC 15019	Speed Boat 15 Meter	Mesin 3 x 250 PK, Yamaha

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B

B. Faktor Eksternal

1. Perbedaan harga yang Signifikan

Diketahui bahwa bawang merah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adanya perbedaan harga bawang yang sangat jauh tentunya menjadi pertimbangan masyarakat, hal itu mendorong masyarakat untuk cenderung lebih memilih bawang ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga bawang lokal.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri selaku Kepala Subseksi Intelijen menambahkan :

“Harga bawang merah di Malaysia lebih murah dibanding di Indonesia. Harga per kilogram bawang merah di Malaysia Rp. 15.000,00 terutama pada saat produksi melimpah. Sedangkan di Indonesia bisa mencapai Rp. 28.000,00. Tentunya hal ini menjadi penyebab masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi bawang ilegal tersebut dikarenakan bawang merah merupakan bahan utama dalam setiap bahan masakan sehari-hari.”

(Sumber : Kepala Subseksi Intelijen, 3 Desember 2018)

2. Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari mengonsumsi bawang ilegal juga sangat minim. Sesungguhnya terdapat beberapa aspek yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun negara yaitu dari segi kesehatan, ekonomi, dan materil.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sapar A.Hasibuan selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan :

”penyelundupan bawang termasuk masalah yang krusial, karena terdapat beberapa aspek kerugian yang disebabkan oleh hal tersebut. Pertama dari segi kesehatan, bawang-bawang yang masuk secara ilegal sudah pasti tidak melalui proses karantina karena ingin menghemat waktu dan biaya. Padahal normalnya bawang yang masuk secara resmi harus melalui proses karantina dan uji laboratorium terkait kandungan-kandungan yang berbahaya; kedua pada segi ekonomi, sudah pasti merusak pasar. Petani-petani lokal mengalami kerugian karena bawang ilegal cenderung lebih murah harganya dibanding bawang lokal, padahal dari segi kualitas jauh sangat baik bawang lokal; ketiga dari segi materil, merugikan negara karena tidak terpungutnya bea masuk / pajak barang impor.”

(Sumber : Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, 22 November 2018

3. Banyaknya Pelabuhan Rakyat Tempat Pemasukan Bawang Ilegal

Adanya penyelundupan yang terjadi dikawasan KPPBC TMP B Kota Dumai dapat dinilai dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Seperti adanya tindak penyelundupan barang ilegal yang ditemukan di pelabuhan-pelabuhan kecil. Berikut tabel pemasukan barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Tahun 2015-2019 :

Tabel 6

Pelabuhan Rakyat Tempat Pemasukan Bawang Ilegal

1.	Nama Pelabuhan Rakyat	1. Pelabuhan Rakyat Panglong Arang, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung 2. Pelabuhan Rakyat Sungai Mesjid, Lubuk Gaung 3. Pelabuhan Rakyat Sungai Kemeli, Pelintung 4. Pelabuhan Rakyat Sungai Selensen, Pelintung 5. Pelabuhan Rakyat Tanjung Leban, Pelintung
2.	Jalur darat setelah tempat pembongkaran	1. Pelra Panglong Arang, Sungai Sembilan – jalan darat Lubuk Gaung – Simpang empat purnama - ring road Dumai – simpang empat terminal bus Klakap Tujuh - Bukit Timah – Pekanbaru atau Medan 2. Pelra Sungai Mesjid, Lubuk Gaung rute darat sama dengan rute darat Pelra Panglong Arang, Sungai Sembilan 3. Pelabuhan Rakyat Sungai Kemeli, Pelintung ada 2 (dua) jalur darat : - Belok kiri Jl.Arifin Achmad, Pelintung – Jl.Lintas Dumai pakning – Siak atau Pekanbaru - Belok kanan Jl.Arifin Achmad, Pelintung – simpang tiga Jl. Pertamina Dumai 4. Pelabuhan Rakyat Sungai Selensen, Pelintung rute darat sama dengan rute darat Pelabuhan Rakyat Sungai Kemeli, Pelintung 5. Pelabuhan Rakyat Tanjung Leban, Pelintung rute darat sama dengan rute darat Pelabuhan Rakyat Sungai Kemeli, Pelintung

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B, 2019

KESIMPULAN

1. Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai dalam

- rangka pengawasan terhadap bawang ilegal belum maksimal dikarenakan belum terlaksananya pengawasan secara efektif yaitu adanya ukuran dan standar pengawasan yang masih lemah, tidak maksimalnya penilaian pekerjaan di pihak bea dan cukai dan pembetulan penyimpangan yang tidak berjalan.
2. Terdapat faktor intenal dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Dumai. Adapun faktor internalnya yaitu kurangnya jumlah pegawai yang berkompeten dan kapal patroli yang tidak memadai. Faktor eksternalnya yaitu, perbedaan harga bawang yang signifikan, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan banyaknya pelabuhan rakyat tempat pemasukan bawang ilegal.

SARAN

1. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai meningkatkan pengawasan dan penertiban pada proses impor (masuknya barang dari luar kedalam negeri) khususnya pada importir yang beresiko tinggi dan mengawasi secara ketat pelabuhan-pelabuhan rakyat yang kerap dijadikan sebagai tempat masuknya bawang ilegal.
2. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Dumai meningkatkan kinerja dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pengawasan, dan memperketat pengawasan pada wilayah-wilayah perbatasan laut yang menjadi tempat pemasukan bawang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Arifin. 2001. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Efendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Handoko, T, Hani. 1995. *Manajemen*. BPPE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Moleong, J, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Musthopadijaya. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Nitisemito, Alex. 1989. *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta cv.
- Sujati, Sri. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sondang, Siagian. 1995. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.
- Winardi. 1979. *Azas-azas Manajemen*. Bandung : Alumni Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71/M.DAG/PER/9/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 Tanggal 30 Oktober 2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Jurnal

- Esa, Reza Abdi. 2014. Fungsi Dirjen Bea dan Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata Di Indonesia. Vol.II/No.7/Ags/2014
- Herlinawati, Yunita, Kadarisman H, dan Arief S. 2016. Analisis implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol. 10 No. 1 2016|
- Kurniawan, Yudha. 2017. Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017*
- Syahputra, Azmi. 2015. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. volume 3 No. 1
- Triyani dan Murti Ayu Hapsari. 2015. *GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015*

Situs Web

<https://www.dumaikota.go.id/>